

# HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA DI MASA OBAMA: dari Kerja Sama Antiteroris sampai Penggalangan Demokrasi

Oleh: Siswanto

## *Abstract*

*This paper is to analyze the USA - Indonesia relationship in the period of Obama's presidency since the relationship between two countries has a very great potency and opportunity to be more improvable. As we all recognize that President Obama has a special relation with Indonesia because of he lived through his childhood in Indonesia eventhough there will be no guarantee that will become the main reason in improving better relationship since it is related to many political variables. As conclusion, this paper argues that the prospect of the USA-Indonesia relationship basically depends on how the two countries implement Comprehensive Partnership Agreement as well as possible and how both sides give serious attention to improve better bilateral relationship.*

## **Pendahuluan**

Pasca-Perang Dingin struktur internasional mengalami perubahan dari pola bipolarisme kepada pola yang belum jelas. Namun demikian, sebagian pakar mengidentifikasi perubahan itu terjadi dari bipolarisme kepada multilateralisme. Sebagian masyarakat "Barat" berspekulasi bahwa struktur internasional saat ini adalah perang antara AS melawan terorisme internasional. Spekulasi ini merujuk pada tragedi WTC tahun 2001 yang mendorong AS melakukan kebijakan *Counter of terror*. Implementasi dari kebijakan ini bisa dilihat dari aksi pendudukan AS di Irak dan Afganistan karena dua negara ini dipandang oleh AS punya keterkaitan dengan terorisme. Spekulasi di atas bisa dimaknai sebagai pengembangan tesis Samuel Huntington tentang konflik peradaban antara Barat vs Islam berkenaan dengan berakhirnya Perang Dingin antara AS melawan Uni Soviet.

Penerimaan atas tesis Huntington tersebut secara tidak langsung berarti melegitimasi pandangan bahwa teroris punya keterkaitan dengan Islam. Pandangan ini sudah pasti ditolak oleh komunitas muslim. Pandangan di atas jelas suatu simplifikasi dan generalisasi yang terburu-buru sehingga tidak menghiraukan kaidah kehati-hatian dan objektivitas dari dunia ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, pada tahun 2009 Obama tampil menjadi Presiden AS. Tampilnya Obama

menimbulkan opini yang beragam di Indonesia yaitu sebagian masyarakat berpandangan optimis, namun sebagian lagi pesimis dalam konteks hubungan Indonesia-AS. Mereka yang optimis meyakini pribadi Obama akan berpengaruh kepada arah kebijakan luar negeri AS kepada Indonesia. Optimisme ini berpijak pada pertimbangan bahwa Obama punya hubungan historis dengan Indonesia. Sedangkan, mereka yang berpandangan pesimis melihat pemerintah AS sebagai sebuah sistem jadi Obama tidak serta-merta dapat mendongkrak hubungan bilateral Indonesia-AS karena banyak masih faktor lain yang berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri AS. Tambahan lagi, berkembangnya pemikiran bahwa hubungan bilateral AS-Indonesia lebih banyak ditentukan oleh faktor kepentingan nasional kedua negara.

Hubungan bilateral Indonesia-AS di era Presiden Obama secara teoritis bisa lebih berkembang dibanding era sebelumnya. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa Obama memiliki latar belakang sejarah dan emosi dengan Indonesia. Latar belakang ini bisa mendorong kepada *image*-nya yang positif tentang Indonesia. Namun demikian, itu baru merupakan modal awal dalam agenda peningkatan hubungan bilateral. Jadi, *image* saja tidak cukup, tetapi perlu ditindak lanjuti oleh para pihak, khususnya Indonesia sebagai pihak yang lebih berkepentingan. Di satu pihak, Indonesia perlu mengidentifikasi

kasi kepentingan nasionalnya, dan di lain pihak perlu mengidentifikasi kepentingan nasional AS. Upaya ini dilakukan dengan merujuk pada MOU Keja sama Komprehensif.

### Posisi Strategis Presiden Amerika Serikat

Dalam sistem Pemerintahan AS terdapat lima sumber-sumber proses kebijakan luar negeri. Sumber-sumber tersebut adalah: (i). sumber eksternal; (ii). sumber masyarakat; (iii). sumber pemerintahan; (iv). sumber peranan; dan (v). sumber individu.<sup>1</sup> Arah kebijakan luar negeri AS tidak terlepas dari sejumlah variabel tersebut, walaupun tidak semuanya pastilah satu, dua, atau tiga variabel menjadi faktor dari arah kebijakan luar negeri tersebut. Memahami keberadaan dan keterkaitan sumber-sumber kebijakan luar negeri ini akan mendorong kepada keadaan yang lebih terang dalam mengikuti arah dan praktik kebijakan luar negeri AS tersebut.

Presiden AS punya posisi strategis dalam proses kebijakan luar negeri AS karena dapat mempengaruhi sumber-sumber tersebut. Sejalan dengan hal itu, Presiden AS perlu diidentifikasi latar belakang kepribadiannya dari berbagai sudut pandang. Latar belakang kepribadiannya diduga mempengaruhi alam pemikiran, perspektif, harapan, dan kebijakannya, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri. Dalam konteks itu, beberapa dimensi bisa menjadi pertimbangan seperti: sejarah hidupnya, partai politik yang mengusungnya, dan ideologi yang melingkupinya. Sejarah kehidupan Presiden AS menjadi sumber nilai-nilai yang akan mempengaruhi pandangan dan keputusan-keputusannya dalam hubungannya dengan negara lain. Semua hal ini sedikit atau banyak akan bermuara kepada arah kebijakan luar negeri AS.

Pemerintah AS juga sebagai sumber kebijakan luar negerinya. Pemerintah di sini termasuk di dalamnya Presiden dan jajarannya. Jajarannya meliputi, Kementrian Luar Negeri AS yang dalam konteks Sistem Pemerintahan AS lembaga ini dikenal dengan istilah *the Department of State* dan menteri luar negerinya disebut *Secretary of State*. Lembaga lain yang

<sup>1</sup> Charles W. Kegley, et al., *American Foreign Policy*, (New York: St. Martin's Press, Inc., 1996), hlm. 14.

juga secara teori mendukung seorang Presiden AS adalah badan intelejen negara yang di AS dikenal dengan nama CIA (*Central Intelligence Agency*). Selanjutnya, secara teori lembaga-lembaga Pemerintah ini mendukung Presiden AS dalam soal kebijakan luar negeri. Namun demikian, di luar institusi tersebut, Presiden AS biasa dibantu oleh sejumlah staf ahli yang dikoordinir oleh Juru Bicara Gedung Putih. Dengan demikian, Juru Bicara Gedung Putih AS sebenarnya punya peran strategis bukan sekadar menyampaikan pandangan atau rencana-rencana kegiatan Presiden belaka. Selanjutnya, Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) juga menjadi sumber kebijakan luar negeri AS. Badan ini memberi masukan baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden terhadap fenomena nasional maupun internasional yang terkait dengan situasi keamanan khususnya dan politik pada umumnya.

Kongres juga sebagai sumber masyarakat yang mewarnai kebijakan luar negeri AS. Keberadaan Kongres AS tidak bisa dianggap remeh dalam melihat arah kebijakan luar negeri AS ini. Kongres AS dibedakan menjadi Senat (*Senate*) dan DPR (*House of Representative*). AS menganut dua kamar, walaupun demikian kedudukan masing-masing kamar sederajat.<sup>2</sup> Nampaknya, AS mengadopsinya dari model Parlemen Inggris yang juga membagi dirinya ke dalam dua kamar. Antara Senat dan DPR AS terdapat kerja sama yang sinergis dalam melaksanakan fungsi legislasi, misalnya memproses sebuah rancangan undang-undang atau kebijakan publik. Sebuah masukan atau usulan

<sup>2</sup> Hal ini tidak seperti parlemen Indonesia yang bersifat "banci" yaitu mengembangkan dua kamar DPD dan DPR, tetapi hanya menempatkan DPD sebagai pelengkap penderita. Sungguh hal ini suatu kecelakaan politik yang luar biasa karena menjadikan DPR lembaga tanpa pengawasan resmi. Hal ini dilakukan dengan semangat kepentingan sempit anggota DPR belaka. Hal ini dilakukan agar kebijakan DPR tidak ada yang mengontrol atau meng-counter secara formal. DPR Indonesia lembaga *superbody* yang sesungguhnya. Hal ini yang mendorong carut-marutnya Indonesia pasca Soeharto. Untuk Indonesia *Heavy parliament* identik dengan kekacauan politik. Hal ini dibuktikan oleh sejarah politik Indonesia tahun 1950-an ketika Indonesia menganut sistem parlementer. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya kembali memperkuat lembaga eksekutif secara proporsional dan bukan sistem presidensial yang substansi parlementer seperti sekarang. Kondisi politik sekarang bukan yang diidam-idamkan oleh reformasi tahun 1998 karena DPR merajarela dan tidak terkontrol sehingga kekuasaan yang berlimpah tadi cenderung membuat anggotanya korup.

*"Kemarin, Presiden Yudhoyono dan saya menyetujui Kerja Sama Komprehensif yang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemerintahan kedua negara mempererat hubungan di berbagai bidang dan, yang juga penting, memperkuat hubungan antar bangsa. Kerja sama ini tentunya berdasar atas rasa saling membutuhkan dan saling menghormati."*

*"Dengan sisa waktu yang saya miliki hari ini, saya ingin berbagi tentang mengapa kisah yang baru saja saya utarakan begitu penting bagi Amerika Serikat dan dunia. Saya ingin menitikberatkan pembahasan pada tiga hal yang saling berkait-erat serta mendasar bagi kemajuan manusia: Pembangunan, demokrasi dan agama."*<sup>6</sup>

Image positif AS tentang Indonesia telah membuahkan kerja sama komprehensif antara kedua negara. Yang menjadi persoalan adalah tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama tersebut. Banyak kasus kerja sama akhirnya hanya sebatas MOU tanpa implementasi yang berarti sehingga akhirnya embrio kerja sama tersebut tidak melahirkan sesuatu yang riil dari konsekuensi kerja sama yang sudah disepakati. Hal ini yang perlu diwasdai oleh kedua negara khususnya Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia harus bisa mengelola hal tersebut di atas agar kekhawatiran itu tidak terjadi atau dapat dieliminir. Indonesia seharusnya berada dalam posisi lebih aktif dalam mempertahankan momentum kerja sama bilateral Indonesia-AS karena Indonesia lebih membutuhkan AS bukan sebaliknya kendatipun pada prinsipnya secara normatif Indonesia-AS saling membutuhkan.

Pascakunjungan Obama, Pemerintah kabarnya membentuk Pokja Hubungan Indonesia-AS. Namun demikian, penulis lebih suka menyebutnya Pokja Kerjasama Komprehensif Indonesia-AS (Pokja KSK-IND/AS). Pokja ini yang bertanggungjawab untuk menindak lanjuti MOU kerjasama tersebut. Pokja ini konon sudah berhasil meningkatkan kerja sama sejumlah universitas di kedua negara di bidang Iptek dan pengajaran bahasa, baik Inggris maupun

Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini tentu suatu kabar yang menggembirakan.

Berbagai pandangan dalam KSK-IND/AS tentang peningkatan hubungan bilateral Indonesia-AS di bawah ini untuk melengkapi keberadaan Pokja hubungan Indonesia-AS. Sebagian gagasan dalam KSK-IND/AS tentu saja sudah ada dalam Pokja Hubungan Indonesia-AS sehingga berbagai pandangan ini bersifat memperkaya cakrawala hubungan Indonesia-AS. Selanjutnya, sebagian pandangan mungkin belum ada dalam Pokja Hubungan Indonesia-AS. Jika demikian halnya, gagasan dalam KSK-IND/AS bisa ditambahkan ke dalam program-program Pokja Hubungan Indonesia-AS. Selanjutnya, berbagai masukan dan kritikan bisa dijadikan perhatian agar Pokja ini tidak terjebak pada kekeliruan, sebaliknya berhasil mencapai sasaran dan mewujudkan harapan bagi kemaslahatan kedua negara.

Keberadaan Pokja KSK-IND/AS ini idealnya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah maupun masyarakat karena bersifat komprehensif sesuai dengan namanya. Unsur-unsurnya bisa melibatkan : masyarakat atau komunitas Indonesia-AS (Usindo), kalangan dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, KADIN, BKPM, TNI, POLRI, media massa, LSM terkait, Kemendiknas. Keterlibatan berbagai unsur ini untuk memberi muatan substansi kepada KSK-IND/AS yang bercirikan komprehensif ini. Walaupun KSK-IND/AS bercirikan komprehensif, prioritas kerja sama perlu dilakukan dan kalau perlu diusulkan program kerjasama yang berdurasi menengah maupun jangka panjang sekalian. Setiap durasi yaitu jangka pendek, menengah, maupun panjang perlu ditekankan fokus sasaran, dan arah kerja samanya. Misalnya, tahun-tahun pertama atau durasi jangka pendek memfokuskan pada kerja sama ekonomi yang meliputi, perdagangan dan investasi. Hal ini disesuaikan dengan kondisi objektif kedua negara yang sama-sama sedang memerlukan terobosan di sektor ekonomi.

Pokja bertugas mengidentifikasi potensi kerja sama. Seperti diketahui KSK-IND/AS jika dilihat dari pemberitaan di media massa terkesan sangat luas cakupannya. Cakupannya itu meliputi

<sup>6</sup> <http://radhityanotes.com/read/2011/04/02/82/inilah-isi-pidato-lengkap-obama-di-kampus-universitas-indonesia-depok.html>.

<sup>7</sup> "Hillary Dorong RI Perkuat Kepemimpinan ASEAN," *Harian Seputar Indonesia*, 25 Juli 2011.

kerja sama di bidang perdagangan, investasi, lingkungan hidup, energi, pendidikan, militer, ilmu pengetahuan. Beranjak dari cakupan yang luas bidang kerja sama itu maka perlu dipikirkan sektor mana yang menjadi prioritas dan sektor mana yang perlu ditunda terlebih dahulu. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan kesiapan dari pihak Indonesia sebagai mitra kerja sama seperti apa? Prioritas juga perlu diarahkan kepada sektor-sektor di mana pihak Indonesia dipandang siap melakukan kerja sama dan siap meraih keuntungan atau manfaat dari bentuk kerja sama tersebut. Kajian yang demikian penting dilakukan karena untuk menghindari bentuk kerja sama yang hanya menguntungkan negara lain saja, tetapi kurang memberi manfaat nyata bagi pihak Indonesia atau mitranya di Indonesia.

Pokja juga perlu memberi arah pada saat pasca kerja sama. Proyek kerja sama KSK-IND/AS tidak berlangsung selamanya. Usia proyek kerja sama bisa setahun, dua tahun atau tiga tahun. Hal ini bersifat teknis tergantung kesepakatan Pemerintah Indonesia dan AS. Yang menjadi persoalan adalah pascaprojek kerja sama. Ketika satu proyek kerja sama selesai, tindak lanjutnya apa? Apakah segala sesuatunya berlalu begitu saja? Atau ada suatu implementasi nyata pascakerja sama atau setelah proyek kerja sama yang ada berakhir. Pengalaman menunjukkan banyak terjadi kerja sama antara pemangku kepentingan di Indonesia dengan negara donor berakhir tanpa hasil yang nyata. Maksudnya, setelah proyek kerja sama berakhir maka berakhir pula aktivitas yang terkait dengan proyek kerja sama tersebut. Sesuatu yang tersisa hanyalah situs-situs atau peninggalan proyek kerja samanya saja. Hal yang demikian itu sebaiknya dihindari atau tidak terjadi dalam kerja sama Indonesia-AS dewasa ini.

Proyek kerja sama adalah satu fase dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan bantuan negara asing atau negara donor. Ketika proyek kerja sama itu berakhir, pembangunan masyarakat memasuki fase mandiri dan implementasi. Pada fase ini sudah tidak melibatkan keberadaan pihak unsur dari negara asing. Pada fase ini tinggal memanfaatkan pengalaman bermitra dengan pihak asing untuk melakukan pembangunan diberbagai sektor untuk kepent-

ingan masyarakat secara nyata. Jadi, proyek kerja sama hanya berfungsi sebagai stimulus pembangunan guna mewujudkan pembangunan yang sesungguhnya di masyarakat. Jika pola dan mentalitas yang demikian dilakukan, proyek kerja sama menjadi bersifat produktif bukan konsumtif seperti yang selama ini terjadi yaitu ketika habis proyek habis pula kegiatannya. Artinya proyek itu tidak berkelanjutan lagi di masyarakat.

Dengan demikian, proyek kerja sama jangan dilihat sebagai upaya bagi-bagi rejeki dari negara donor kepada berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dalam sektor-sektor tertentu. Paradigma lama ini harus dibuang jauh-jauh ke "laut" digantikan dengan paradigma baru bersifat produktif bukan konsumtif seperti disinggung sebelumnya. Kerja sama konsumtif kegiatannya hanya bersifat menghabiskan uang dan menghasilkan laporan pembukuan atau administrasi belaka. Sebaliknya, kerja sama produktif kegiatannya menghasilkan sesuatu yang nyata bagi masyarakat dan berakhirnya proyek tidak berarti berakhirnya kegiatan. Berakhirnya proyek berarti hanya berakhirnya fase pertama, tetapi berlanjut sebagai awal dari fase kedua yang bercirikan kemandirian atau tidak melibatkan bantuan dari negara donor atau bantuan pihak asing. Hal ini artinya penanggungjawab proyek kerja sama itu harus sudah memikirkan kelanjutan dari proyek tersebut sebelum akhir dari proyek kerja sama jatuh tempo. Separuh dari durasi waktu proyek kerja sama harus digunakan menyiapkan kelanjutan dari proyek yang bersangkutan jika proyek berakhir. Oleh karena pimpinan proyek kerja sama harus orang yang memiliki kompetensi, kemampuan menejerial, dan dedikasi kepada masyarakat.

### **Eksplorasi Kesamaan Kepentingan Indonesia-Amerika Serikat**

Kerja sama bilateral Indonesia-AS selama ini masih bersifat umum dan sebatas eksplorasi kesamaan kepentingan sehingga belum jelas arah dan prioritas dari pengembangan kerja sama di dalam periode jangka panjang. Hal yang demikian tidak salah, namun dipandang baru tahap awal dari sebuah periode pengembangan kerja sama yang nyata dan berkelanjutan karena belum menggali potensi yang ada secara sungguh-sungguh, teren-

cana, dan terprogram sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing negara.

Bidang kerja sama yang cukup berkembang saat ini di bidang penanggulangan terorisme. Hal ini berpijak pada kesepakatan Presiden Bush dan Presiden Megawati tahun 2003 di Bali. Pada saat itu berhasil ditandatangani Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia-AS di bidang kerja sama menghadapi terorisme. Kedua Pemerintah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pendidikan/pelatihan Polri, dan strategi menghadapi terorisme. Lebih dari itu, kedua belah pihak juga pernah mencoba untuk melakukan ekstradisi atas pelaku teror, walaupun upaya ini belum menampakan hasil. Misalnya kasus warga Indonesia pelaku yang teror yang ditangkap pihak AS, namun Indonesia gagal mengembalikannya untuk diadili di Indonesia. Jika diamati, kerja sama ini lebih ke arah kerja sama intelijen. Kedua belah pihak tidak menunjukkan secara terang-terangan, namun sebenarnya kerja sama yang dilakukan cukup signifikan. Bahkan, para pendukung Abu Bakar Ba'asyir mensinyalir ada tekanan Pemerintah AS terhadap Pemerintah Indonesia dalam upaya penangkapan beliau untuk dijadikan tersangka teroris. Dalam konteks yang demikian, AS melakukan intervensi secara tidak langsung dalam soal penanganan terorisme di Indonesia.

Memang faktanya, Indonesia sarang dan sekaligus juga korban terorisme. Seperti diketahui bahwa gembong teroris Dr. Ashari dan Noordin M. Top sudah berhasil dilumpuhkan, namun anak buahnya tetap masih menjadi ancaman. Dua warga Malaysia itu telah berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ideologi teror di Indonesia. Sebenarnya kedua orang ini yang paling bertanggungjawab terhadap aksi teror di Indonesia. Kedua tokoh teroris Melayu ini berhasil mengembangkan strategi cuci otak dan menularkan keahlian strategis lainnya yaitu merangkai bom. Akibatnya, banyak pemuda yang bersedia menjadi pelaku bom bunuh diri atas nama Jihad. Tragedi Bom Bali 1, Bom Bali 2, dan peledakan di sejumlah tempat di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi korban serius dari aksi teror. Indonesia sangat dirugikan baik dari segi moril maupun materil. Pada aksi teror begitu banyak korban nyawa dan luka-luka

sia-sia. Aksi teror ini juga mengundang ketakutan masyarakat internasional untuk datang ke Indonesia karena Indonesia terkesan menjadi negara yang tidak aman. Dalam kondisi yang demikian, Indonesia berkepentingan menjalin dengan kerja sama dengan negara lain guna menghadapi aksi teror tersebut. Dalam hal ini, AS merupakan salah satu negara yang juga berkepentingan memerangi terorisme. Atas dasar itu, kedua negara melangkah menuju kerja sama guna menghadapi aksi teror secara bersama-sama.

Seperti diketahui bahwa AS berkomitmen mengejar teroris sampai ke segala penjuru dunia. Pascapeledakan WTC tahun 2001, kebijakan antiteror (*counter of terror*) menjadi fokus arah kebijakan luar negeri AS. Dalam situasi paniknya, Presiden Bush mengumumkan Doktrin Bush yang isinya mendeklarasikan bahwa: (i). AS melumpuhkan lawan di negaranya; (ii). AS melumpuhkan lawan sebelum lawan menyerang; (iii). AS mengembangkan kebijakan antiteror ke seluruh dunia. Untuk mendukung kebijakan antiterornya, Presiden Bush membagi masyarakat dunia ke dalam "kami" dan "mereka". Terminologi "kami" di sini untuk mengkategorikan kepada masyarakat internasional atau negara-negara yang bergabung dengan AS untuk melawan terorisme. Sedangkan, "mereka" adalah untuk mengkategorikan para pihak atau negara-negara yang bergabung dengan terorisme. Sebenarnya, hal ini merupakan penyerdehanaan persoalan karena ada sejumlah negara yang tidak mendukung terorisme, namun juga enggan bergabung dengan AS. Fenomena ini mengingatkan kita pada pernyataan John. F. Dulles, Menteri Luar Negeri AS tahun 1960-an yaitu tentang keberadaan kekuatan Non-Blok yang dinilai sebagai amoral karena saat itu AS membagi dunia kedalam dua Blok Liberalis dan Komunis. AS tidak menginginkan keberadaan negara-negara Non-Blok.

Kebijakan antiteror AS dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu kebijakan militer dan diplomasi. Sebagai ilustrasi kebijakan penyerangan AS dan pendudukan AS ke Afganistan dan Irak dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan antiteror yang memanfaatkan perangkat militer. Di samping itu, kedua negara ini dipandang oleh AS sebagai negara-negara yang berada dalam

kategori “mereka” sehingga keberadaannya menjadi lawan AS. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan antiteror keberadaannya perlu diperangi sebagai upaya untuk melumpuhkan terorisme. Seperti diketahui salah satu alasan Presiden Bush menghancurkan Irak karena Saddam Hussein dinilai mendukung terorisme. Namun demikian, para pengamat menilai tuduhan ini sulit dibuktikan kebenarannya karena Abu Nidal yang dinilai sebagai tokoh teroris justru tewas secara misterius di Irak di era Pemerintahan Saddam Hussein. Artinya dia tidak melindungi atau bahkan diduga bertanggungjawab atas kematian tersebut. Jika berangkat dari fakta tadi, tuduhan bahwa Saddam Hussein berkoalisi dengan teroris untuk sementara dapat dibantah sampai ada bukti-bukti akurat yang dapat menjelaskan soal kematian Abu Nidal tersebut.

Sementara itu, keputusan AS menyerang Afganistan karena di sana ada Al Qaeda yang dinilai oleh negara ini sebagai basis terorisme. Data intelejen yang diperoleh AS mengarahkan kepada lembaga pendidikan di Afganistan, yaitu Al Qaeda sebagai pihak yang bertanggungjawab atas sejumlah aksi teror. Nampaknya, menurut versi AS, keberadaan Al Qaeda di samping lembaga pendidikan, juga sebagai wadah pembinaan teroris dan perlawanan terhadap AS. Sebenarnya, Paul Wolfowitz, Deputy Bidang Keamanan, Kementerian Luar Negeri AS sejak awal lebih merekomendasi serangan kepada Afganistan ketimbang ke Irak. Namun demikian, di bawah suasana ketegangan hubungan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan saat itu, Pemerintah AS akhirnya memutuskan serangan dan pendudukan Irak. Oleh karena itu, serangan AS kepada Irak nampaknya tidak murni sebagai implementasi kebijakan antiteror, namun lebih pada keinginan Presiden Bush Jr. yang ingin memerangi Saddam Hussein karena juga pernah berperang melawan ayahnya (George Bush).

Selanjutnya, kebijakan antiteror AS menggunakan saluran diplomasi diterapkan kepada Indonesia. Diplomasi ini dapat dilihat dari kunjungan pejabat tinggi AS kepada simbol-simbol Islam di Indonesia. Kunjungan itu misalnya saja adalah kunjungan Menteri Luar Negeri era Presiden Bush, Condoliza Rice ke sekolah-

sekolah dasar Islam di Jakarta, kunjungan Duta Besar AS di Jakarta ke sejumlah pesantren di Jawa dan dalam kunjungan ini perwakilan AS itu memberi bantuan peralatan sekolah, kunjungan Presiden Obama dan Ibu Negara AS ke Masjid Istiqlal. Melalui kunjungan ini, AS ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan musuh umat Islam, melainkan sahabat dari umat Islam. Upaya ini untuk mengisolir terorisme yang mengajak umat Islam untuk berperang melawan AS. Di samping itu, dalam konteks kebijakan antiteror Indonesia berada pada posisi “Kami.” Artinya, Indonesia berada dalam satu kelompok dengan AS menghadapi atau melawan ancaman terorisme. Oleh karena itu, langkah-langkah jalinan kerja sama dan persahabatan perlu dilakukan AS guna meningkatkan saling pengertian dan mempertahankan persahabatan dengan Indonesia. Upaya AS ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengefektifkan usahanya berperang melawan terorisme karena negara ini memandang terorisme ada dan berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah-langkah persuasi dibutuhkan guna mengimbangi seruan-seruan anti-AS yang disuarakan oleh jaringan terorisme di Indonesia.

Di lain pihak kondisi di Indonesia sejalan dengan kebijakan antiteror AS, kebetulan Indonesia juga sedang berperang melawan terorisme dengan tindakan tegasnya. Pengadilan Indonesia bersikap tegas kepada teroris, tetapi anehnya tidak tegas kepada pelaku koruptor. Sudah beberapa tokoh teroris dihukum mati di Indonesia. Mereka misalnya saja adalah Imam Samudra dan Amrozi. Sedangkan, teroris yang lainnya dihukum berat misalnya dihukum seumur hidup, misalnya saja Ali Gufron. Undang-undang di Indonesia memang memungkinkan hukuman mati untuk pelaku tindakan kejahatan terorisme, narkoba, dan korupsi. Pelaku tindak kejahatan terorime dan narkoba sudah ada yang divonis mati. Sedangkan, tindak kejahatan korupsi belum satupun pelakunya dihukum mati. Hal ini menjadi pertanyaan publik, mengapa pelaku korupsi tidak dihukum mati saja padahal undang-undangnya memungkinkan untuk itu? Hal ini penting untuk memberi efek jera. Pengalaman membuktikan hukuman mati kepada koruptor di Cina berhasil menekan laju korupsi di negara itu. Jadi, rakyat perlu mendesak Peradilan Tipikor

dan Peradilan Negeri untuk dilaksanakannya hukuman mati bagi koruptor di atas satu Miliar. LSM sudah waktunya menyuarakan hal ini kepada masyarakat jika sungguh-sungguh ingin membersihkan koruptor. Selanjutnya, keganjilan lain terjadi dalam aksi Polri dengan Tim Densus 88 antiterornya. Polri sering mengizinkan media massa untuk mengeksplorasi operasi penumpasan teroris secara langsung dan detail. Apakah hal ini untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memberantas teroris dihadapan AS sebagai mitranya? Operasi penumpasan teroris bukan pertandingan sepak bola atau panggung musik hiburan sehingga tidak perlu disajikan kepada permirsa secara langsung, tetapi cukup diberitakan saja. Upaya ini bisa membahayakan kru media massa yang bersangkutan dan menyajikan tindakan kekerasan yang tidak baik ditonton oleh masyarakat, khususnya anak-anak.

Seperti diketahui, tradisi politik luar negeri AS adalah menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Alenia kedua Deklarasi Kemerdekaan AS 1776 memang menyuarakan nilai-nilai demokrasi. Dalam alenia ini dijelaskan tentang kebebasan, persamaan, dan hak-hak individu yang dalam bahasa politik diterjemahkan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM). Banyak pengamat menilai penegakan HAM atau alenia kedua Deklarasi Kemerdekaan AS ini merupakan dasar dari diplomasi AS ke segala penjuru dunia. Langkah-langkah perluasan nilai-nilai demokrasi ini biasanya semakin bersemangat jika presidennya berasal dari Partai Demokrat. Obama berasal dari Partai Demokrat jadi secara teori punya kepentingan kuat untuk menegakan demokrasi atau HAM ke seluruh dunia seperti dibicarakan pada bagian sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2009 ketika Obama berpidato di Kairo dalam rangkaian lawatan perdananya ke Timur Tengah, Indonesia dijadikan teladan dalam hal penegakan demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun berhasil melakukan transisi demokrasi dengan baik. Hal ini di hadapan Obama suatu prestasi yang penting diinformasikan ke seluruh dunia karena seperti umumnya presiden yang berasal dari Partai Demokrat cenderung peduli kepada soal penegakan HAM dan demokrasi.

Pendeknya, di hadapan Obama keburukan Indonesia tertutup oleh keberhasilan proses demokratisasi yang berjalan relatif stabil dan terkendali.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat perkembangan yang menarik di Timur Tengah. Dua tahun setelah Obama berpidato tentang perlu negara-negara berkembang khususnya negara-negara Islam mencontoh Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk mayoritas muslim maka Timur Tengah bergejolak menuju transisi demokrasi. Hal ini terjadi mulai dari di Tunisia, Mesir (tempat Obama menyampaikan pesan-pesan demokrasi), Yaman, Suria, Libya, Bahrain, Saudia Arabia. Namun demikian, hal ini memang tidak sedasyat gelombang demokrasi yang melanda Eropa Timur di akhir tahun 1980-an. Setidak-tidaknya beberapa negara di Timur Tengah sudah melepaskan diri dari cengkaman sistem yang otoriter dan korup lalu, mencoba membangun tatanan demokrasi seperti negara Tunisia, Libya, Suriah, dan Mesir, sedangkan negara yang lain rakyatnya masih berjuang menuju negara yang demokratis.

Memang masih terlalu dini, untuk mengidentifikasi pidato Obama sebagai faktor eksternal dari proses demokratisasi di Timur Tengah. Ada kemungkinan atau bisa saja pidato Obama yang berisi pesan-pesan demokrasi menjadi inspirasi bagi rakyat atau kekuatan politik yang di Timur Tengah. Hal ini masih perlu kajian yang lebih intensif tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Timur Tengah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyulut dari proses demokratisasi tersebut. Dibandingkan dengan di Eropa Timur jelas faktor eksternalnya adalah *Glasnot* dan *Prestroika* di Rusia yang kemudian menggelingding bagai "bola salju" yang merobohkan tatanan komunis di Eropa Timur satu demi satu. Suatu kajian perbandingan transformasi atau reformasi yang menarik antara di Eropa Timur dan Timur Tengah. Di kawasan Timur Tengah terkesan reformasi berjalan kurang dasyat walaupun kedua kawasan sama-sama berada di bawah cengkaman tatanan otoriter.

Berpijak pada fakta di atas, Indonesia punya kedudukan strategis di hadapan Obama. Indonesia di tempat pada posisi terhormat sebagai pilar demokrasi dari negara-negara

Islam, Obama ingin membangun demokrasi di dunia dengan menjadikan Indonesia sebagai model dari impiannya itu. Indonesia dijadikan sebagai mitra dalam membangun demokrasi di dunia khususnya di Timur Tengah. Membangun demokrasi dengan penduduk berjumlah lebih dari 200 juta bukan perkara mudah. Apalagi, Indonesia sebelumnya berada di bawah sistem yang totaliter sehingga tradisi politik harus dimulai dari titik nol kembali dengan segala resiko yang sangat buruk menimpa Indonesia mulai dari etika politik yang buruk para politisi sampai dengan korupsi yang meraja rela di semua lini kehidupan. Hal ini sebenarnya suatu yang ironis di lihat dari luar Indonesia bagaikan “emas” yang bersinar gemerlap, namun dilihat dari dalam Indonesia bagaikan “awan gelap” yang menutup optimisme rakyatnya dalam menatap masa depan.

Indonesia pascareformasi, penegakan demokrasi memang menjadi prioritas utama. Bangsa Indonesia sangat berkepentingan dengan penegakan demokrasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter. Karena terlalu lama berada di bawah sistem yang tidak demokrasi, bangsa Indonesia menjadi mengalami kemunduran dan pembodohan dalam kehidupan politiknya. Elit politik kehilangan idealismenya, sebaliknya rakyat bersikap oportunistis, suaranya dapat dibeli oleh elit politik. Pengusaha berkolaborasi dengan politisi untuk menggapai kepentingan dirinya, tetapi bukan kepentingan publik. Proses pengembangan demokrasi ini memerlukan pengorbanan yang besar dari bangsa Indonesia. Banyak rakyat kehilangan kontrol dalam memanfaatkan demokrasi atau kebebasan. Akhirnya, mereka terjebak dalam anarkisme yang merugikan masyarakat maupun pemerintah. Seringkali, demonstrasi oleh masyarakat diramaikan oleh bakar-bakaran ban bekas atau pengrusakan fasilitas publik. Kondisi yang demikian kontraproduktif dengan semangat reformasi yang mengedepankan demokrasi dengan sifat toleransi dan antikekerasan. Namun demikian, bangsa Indonesia tetap mengawal demokrasinya yang masih belum sempurna dan belum dewasa itu, walaupun melalui perjuangan yang berat dengan harapan tidak ada pihak yang tergoda untuk mematahkan kembali demokrasi yang sudah mulai berkembang itu atau kembali

ke tatanan yang otoriter. Pendeknya, keberhasilan proses demokratisasi yang stabil merupakan target utama reformasi karena merupakan modal utama bangsa Indonesia menatap masa depan yang penuh harapan.

Indonesia bersinergi dengan AS dalam pengembangan demokrasi di dunia sekaligus menjadi model negara Islam seperti disinggung pada bagian sebelumnya. AS berkepentingan membangun tatanan demokrasi di dunia. Keberadaan AS sebagai negara adidaya membawa konsekuensi untuk mewarnai tatanan internasional melalui nilai-nilai demokrasi. Apalagi, dirinya merupakan pemenang dari Perang Dingin yang berlangsung kurang lebih selama setengah abad, selama kurun waktu abad ke-20. Oleh sebab itu, negara ini lebih leluasa dalam penyebaran demokrasi. Musuh demokrasi adalah pemerintahan yang otoriter, apakah sistem otoriter dalam tatanan komunis atau monarki inkonstitusional. Sementara itu, *image* negara Islam selama ini adalah otoriter atau monarki inkonstitusional. Di lain pihak, Indonesia berhasil melakukan reformasi tatanan politiknya sejak tahun 1998. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, penduduk mayoritasnya adalah Islam. Bahkan, Indonesia berpenduduk Islam terbesar di dunia. Keberhasilan Indonesia dalam transisi politik dari pemerintahan otoriter kepada pemerintahan demokrasi dipandang oleh masyarakat internasional khususnya AS suatu prestasi. Jadi, Indonesia dan AS berkepentingan dengan pengembangan demokrasi ini, Indonesia berharap bahwa keberhasilan ini dapat merubah *image* bahwa negara Islam itu cenderung otoriter. Sedangkan AS berharap, Indonesia menjadi inspirasi bagi negara Islam lainnya dalam soal pengembangan demokrasi.

Selanjutnya, hal lain yang juga menarik perhatian adalah Presiden SBY cenderung ingin mengambil peran dalam pentas Politik Dunia. Untuk memainkan peran politik tersebut, Indonesia memperhitungkan keberadaan AS sebagai negara pemenang Perang Dingin. Sebagai negara pemenang Perang Dingin AS mengontrol sistem internasional. Langkah Indonesia ini akan sukses sejauh dipandang tidak mengancam kepentingan global AS. Oleh karena itu, Indonesia dituntut piawai dalam memerankan diplomasi globalnya.



Indonesia bisa berbeda pendapat dengan AS dalam satu persoalan internasional, namun tidak perlu sampai mengarah kepada pola hubungan konflik atau perseteruan frontal. Dengan prinsip diplomasi yang demikian, Indonesia bisa tetap berdaulat dalam kebijakan luar negerinya, namun tidak memperoleh gangguan atau tekanan dari politik global AS. Selanjutnya, Indonesia di bawah Presiden SBY ingin mengulang sejarah Indonesia di bawah Presiden Sukarno yang memainkan peran penting dalam konteks politik internasional di era 1960-an. Presiden SBY juga ingin menjadi pemimpin Indonesia yang diperhitungkan di kancah internasional dengan segala kekurangan dan kelebihan. Apalagi, Presiden SBY dari segi penampilan postur tubuhnya juga tidak kalah dari Sukarno. Di samping itu, Presiden SBY juga ingin membangun antithesis kebijakan luar negeri Indonesia dari kebijakan luar negeri Indonesia yang melihat ke dalam di bawah Presiden Soeharto menjadi kebijakan luar negeri yang melihat keluar atau paling tidak seimbang. Presiden Soeharto mengembangkan kebijakan luar negerinya dengan pola *low profile*, sedangkan Presiden SBY ingin menampilkan kebijakan luar negeri yang berpola *high profil* guna kembali membawa Indonesia kepada kancah pergaulan internasional.

Nampaknya, AS mendukung ambisi Indonesia tersebut. Indonesia di bawah Presiden SBY menjadi bagian dari sistem internasional yang penting. Setidaknya tercatat bahwa Indonesia di bawah Presiden SBY pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan ini suatu posisi terhormat dalam pergaulan internasional dan tidak mudah untuk menduduki posisi tersebut. Di samping itu, Indonesia di bawah SBY juga menjadi anggota G-20 yaitu lembaga internasional yang terdiri dari gabungan sejumlah kepala negara yang mewakili negara-negara maju dan mewakili negara-negara berkembang. Presiden SBY bisa bergabung dengan kelompok G-20 adalah sebuah prestasi yang besar. Prestasi ini tanpa dukungan dan restu AS nampaknya sulit terwujud. Baik Dewan Keamanan maupun G-20 memiliki posisi strategis karena Dewan Keamanan mendiskusikan dan memutuskan kebijakan untuk mengatasi konflik-konflik di dunia yang dipandang mengancam ketertiban dan

keamanan internasional. Sedangkan, G-20 menjadi forum tukar pikiran untuk masalah-masalah di bidang politik dan ekonomi dunia guna mencari solusinya. Selanjutnya, kaum pemilik modal AS juga mendukung sektor ekonomi makro Indonesia. Pemilik modal ini khususnya mendukung stabilitas moneter di Indonesia karena pengalaman krisis ekonomi 1998 diawali pada sektor keuangan dan perbankan nasional.

### **Realitas Struktur Hubungan Indonesia-Amerika Serikat**

Hubungan Indonesia-AS dapat dicermati secara formal dan material. Hubungan Indonesia-AS secara formal berpijak pada idealisme pola hubungan internasional yang setara, saling menghormati, tidak mencapuri urusan dalam negeri para pihak, dan saling menguntungkan. Sedangkan, hubungan Indonesia-AS secara material tidak dapat dilepaskan dari siapa yang lebih berpengaruh sehingga sulit untuk menjalin hubungan yang secara riil setara, seimbang, dan saling menghormati kedaulatan nasional masing-masing. Negara yang lebih berpengaruh akan lebih punya peluang untuk mengontrol kendali hubungan bilateral tersebut. "*Structure as the distribution of power capabilities, in the aggregate, among states.*"<sup>8</sup> Jadi struktur hubungan Indonesia- AS tidak terlepas dari dominasi AS karena negara ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang Indonesia.

Seandainya, hubungan Indonesia-AS nampak lebih ditentukan oleh pihak AS karena memang demikian logika materialnya. AS lebih memiliki peluang untuk menentukan arah dan prioritas kerja sama bilateral, namun demikian Indonesia bukan sama sekali hanya menjadi obyek atau pelengkap penderita dalam arena kerja sama bilateral tersebut. Indonesia tetap memiliki celah untuk ikut memberi arah perkembangan kerja sama bilateral khususnya sejauh pihak Indonesia memiliki persiapan dan konsep yang jelas dalam kerja sama tersebut. Oleh karena itu, diplomasi dan kesiapan sangat menentukan posisi Indonesia dalam mengimbangi AS dalam kerja sama bilateral yang akan dikembangkan.

<sup>8</sup> Robert O. Keohane *et.al.*, *Power and Independence: World Politics in Transition*. (Boston: Little Brown and Company, 1977), hlm. 40.

Jika Indonesia tidak memiliki persiapan yang memadai dalam merumuskan kerja sama khususnya dalam kerangka KSK IND/AS seperti disinggung di atas, posisi Indonesia sudah dapat diperkirakan. Bagaimana mungkin Indonesia bisa memainkan peran yang besar jika tidak memiliki persiapan yang memadai? Sedangkan Indonesia memiliki persiapan yang matang saja belum tentu dapat mengimbangi kecenderungan dominasi AS karena pengaruh negara ini lebih besar, tetapi setidaknya posisi Indonesia akan lebih kuat dalam mengimbangi kecenderungan dominasi AS tersebut. Selanjutnya, bukan tidak mungkin, posisi tawar Indonesia juga akan lebih baik di hadapan AS. Jika hal ini terwujud, peluang Indonesia juga lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Pascakunjungan Obama, kerja sama bilateral Indonesia-AS umumnya baru sebatas komitmen formal dan seremonial. Peluang dan kesempatan kerja sama ini telah dibuka lebar-lebar. Peluang ini khususnya ditandai oleh kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bulan April 2011 yang lalu. Dalam kunjungan ini ditandatangani MOU tentang KSK-IND/AS yang bidang kerja samanya komprehensif atau luas. Sebenarnya, kalau mau jujur cakupan kerja sama ini terlalu ambisius sehingga seolah-olah kehilangan fokus. Sesuatu yang dikhawatirkan karena terlalu cakupannya KSK-IND/AS malah sulit memulainya. Dengan kata lain, luasnya cakupan KSK-IND/AS justru menjadi kendala tersendiri. Sesuatu hal yang harus diperhatikan, jangan sampai peluang itu menguap atau kehilangan momentum. Waktu berjalan cepat, KSK-IND/AS berpacu dengan waktu. Presiden Obama belum tentu menang pada periode Pemilu Presiden tahun 2012. Seandainya Presiden Obama menang dalam Pemilu 2012, apakah dia masih bersemangat mengembangkan KSK-IND/AS karena waktu dapat merubah segalanya? Bisa jadi, Indonesia bukan lagi negara yang dipandang prioritas atau penting bagi Obama karena pihak Indonesia tidak menunjukkan *gregetnya* dalam mengembangkan KSK-IND/AS yang telah ditandatangani tersebut.

Kunjungan delegasi KADIN AS ke Indonesia sudah dilakukan, tetapi tindak lanjutnya belum ada. Pihak AS sudah menunjukkan upaya merealisasikan KSK-IND/AS bidang ekonomi. Jika

tidak salah, sejumlah pengusaha yang datang tertarik di sektor pertambangan. Artinya, mereka berpotensi menanamkan modalnya di Indonesia di sektor pertambangan. Pengusaha AS memang umumnya berinvestasi di Indonesia disektor tambang, misalnya Caltex di bidang eksplorasi Migas, Freeport di bidang eksplorasi emas dan tembaga, Newmont juga di bidang eksplorasi emas, sebagian lagi pengusaha AS berinvestasi di sektor perbankan dan asuransi. Namun demikian, belum ada gejala anggota KADIN AS yang datang ke Indonesia itu melangkah kepada tahapan yang lebih kongkret lagi untuk berinvestasi. Kemungkinan positif, mereka mungkin masih melakukan kajian bisnis karena berinvestasi harus memberi keuntungan oleh karena itu perlu kajian yang benar dan akurat. Kemungkinan negatif, mereka datang ke Indonesia hanya karena desakan Presiden Obama untuk memenuhi kewajiban moral setelah ditanda tangani MOU KSK-IND/AS. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin berinvestasi di Indonesia. Kemungkinan berubah dari positif menjadi negatif, mereka pada awalnya memang ingin serius berinvestasi di Indonesia, namun setelah mengetahui iklim berinvestasi di Indonesia tidak begitu menjanjikan atau tidak sehat mereka kemudian mengundurkan diri atau memilih untuk membatalkan rencana berinvestasinya di Indonesia.

Nampaknya, potensi peningkatan hubungan bilateral Indonesia-AS belum tergalai secara maksimal. AS memang menunjukkan upayanya menjalinkan kerja sama dengan Indonesia, namun baru sedikit sekali yang ditandai dengan kunjungan KADIN AS tersebut. Dari ruang lingkup KSK-IND/AS yang luas itu masih banyak bidang yang belum tersentuh atau terkelola secara maksimal. Pengembangannya memerlukan waktu, proses, dan komitmen. Berbicara soal komitmen, AS menunjukkan komitmennya untuk menggalang hubungan baik dengan Indonesia. Komitmen ini dapat dilihat dari sikap dan kunjungannya ke Indonesia.

Namun demikian, secara umum memang investasi AS di Indonesia besar. Sampai bulan Juli 2011 kedudukan AS masih urutan ke-2 setelah Jepang yang berada di urutan teratas. Investasi AS ini memiliki nilai ekonomi dan politik. Secara ekonomi, investasi ini tentu memberi keuntungan

kepada investor AS selain memberi keuntungan kepada pihak Indonesia. Selanjutnya secara politik, investasi AS member keuntungan karena mendorong kepada stabilitas ekonomi makro Indonesia, lalu stabilitas ekonomi makro ini membantu terciptanya stabilitas politik. Dengan kata lain, investasi AS berdampak positif bagi dinamika politik Indonesia. Fenomena tingginya nilai investasi AS menunjukkan tetap tingginya keberadaan Indonesia di hadapan AS. Dalam hal ini, AS tetap berkepentingan melindungi Indonesia dari badai krisis ekonomi yang berdampak kepada krisis politik seperti tahun 1997. Jadi, ada dimensi lain dari investasi AS di Indonesia ketimbang hanya dimensi ekonomi semata.

### Catatan Penutup

Presiden AS mempunyai posisi strategis terhadap arah kebijakan luar negeri AS. Presiden AS punya peluang untuk mempengaruhi sumber-sumber kebijakan luar negeri AS, seperti: (i). sumber pemerintahan; (ii). sumber peranan; (iii). sumber individu; (iv). sumber masyarakat. Sumber pemerintah di sini dimaksudkan kantor-kantor pemerintahan AS dan birokrasi berada di bawah kontrol Presiden sehingga dapat dipastikan akan mendukung garis kebijakan seorang Presiden AS. Kontrol ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh Presiden yang kuat karena seorang Presiden AS merupakan orang nomor satu di AS. Dia dipilih langsung oleh mayoritas rakyat AS sehingga dia sangat menyadari eksistensinya bahwa dirinya kuat secara politik. Namun demikian, dia tetap memperhatikan suara Kongres AS khususnya dalam melakukan hubungan dengan negara lain karena Konstitusi AS artikel 10 memberi rambu-rambu kepada Presiden AS dalam menjalankan mesin kekuasaan yang terkait dengan negara asing.

Sikap Presiden AS terhadap negara lain ditentukan oleh *image*-nya terhadap negara tersebut. *Image* elit yang berpengaruh dapat mendorong kepada kebijakan perang atau damai. *Image* Obama yang positif tentang Indonesia setidaknya dapat mendorong negara ini memberi perhatian besar kepada Indonesia. Selanjutnya, hal ini jika terkelola dengan baik dapat meningkatkan hubungan bilateral antara AS dan Indonesia.

Di lain pihak, Indonesia dituntut lebih proaktif untuk mengimbangi *image* positif Obama terhadap Indonesia. *Image* positif tadi baru modal awal untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Segala sesuatunya tergantung dari seberapa jauh para pihak berhasil mengolah modal awal tadi. *Image* positif Obama tidak serta menjamin membaiknya hubungan bilateral AS-Indonesia.

Selama ini Obama terkesan dengan kebijakan penanganan teror dan demokratisasi di Indonesia. Indonesia dipandang tegas terhadap teroris. Ketegasan ini dibuktikan adanya hukuman mati terhadap sejumlah pelaku teror di Indonesia. Hukuman mati yang telah dilaksanakan itu cukup mengundang respon positif AS sebagai negara yang juga berperang melawan teroris. Keberhasilan Indonesia melumpuhkan gembong-gembong teroris juga mengundang kekaguman AS terhadap upaya penanganan teroris di Indonesia. Selanjutnya, proses demokratisasi di Indonesia juga dipandang berhasil. Indonesia berhasil melakukan transisi demokrasi dengan mulus tanpa gejolak yang berarti. Pemilu demokratis dan langsung telah dilakukan baik untuk Pilpres maupun Pilkada. Walaupun dalam Pilkada terjadi riak-riak konflik, namun secara umum proses politik itu diakui berhasil. Atas keberhasilan itu, Obama berharap Indonesia menjadi inspirasi negara lain dalam melakukan demokratisasi.

Yang perlu digarisbawahi, hubungan Indonesia AS di era Obama bisa berkembang ke arah optimis, tetapi bisa juga ke arah pesimis. *Pertama*, hubungan bilateral kedua negara berkembang ke arah optimis jika kedua negara dapat mencapai kepentingannya dengan merujuk pada KSK-IND/AS sehingga MOU-nya diimplementasikan secara nyata dan maksimal. *Kedua*, hubungan bilateral kedua negara berkembang pesimis jika target-target kepentingan kedua negara tidak terpenuhi atau dengan kata lain jika KSK-IND/AS tidak bisa dijabarkan lebih lanjut dalam program-program nyata.

Dengan demikian, kuncinya terletak pada sejauh mana MOU KSK-IND/AS bisa diterjemahkan dalam tataran implementasi? Jika kedua negara mampu melakukannya, Indonesia-AS akan bergerak menuju peningkatan hubungan bilateral baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sebaliknya, jika kedua negara tak mampu melakukannya atau Indonesia tidak sanggup meyakinkan AS tentang pentingnya KSK-IND/AS, *image* positif Obama akan kehilangan momentum dan berlalu tanpa manfaat yang signifikan bagi kedua negara khususnya Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Aksan, Hermawan. 2008. *Jangan Bunuh Obama*. Jakarta: Mizan.
- Irish, D. Marian. 1965. *Politics of American Democracy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Kegley, Charles, W. *Et.al.* 1996. *American Foreign Policy*. New York: St. Martin's Press, Inc.
- Kelley, Boorstin. 1990. *A History of the United States*. Massachusetts: Prentice Hall.

Keohane, Robert O dan Joseph Nye. 1977. *Power and Independence: World Politics in Transition*. Boston: Little Brown and Company.

Klingberg, Frank L. 1983. *Cyclical Trends in American Foreign Policy Moods*. New York: University Press of America, Inc.

Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

Waltz, Kenneth N. 1995. "Realist Thought and Neorealist Theory," dalam *Controversion in International Relations Theory*, Charles W. Kegley, Jr. (Ed.). New York, St.Martin Press, Inc.

"Hillary Dorong RI Perkuat Kepemimpinan ASEAN," *Harian Seputar Indonesia*, 25 Juli 2011.

<http://radhityanotes.com/read/2011/04/02/82/inilah-isi-pidato-lengkap-obama-di-kampus-universitas-indonesia-depok.html>.